ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya
Volume 9, Nomor 1, Februari 2020: 39 - 49
https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v9i1.721

ISSN: 2252-9144 (Cetak)
ISSN: 2355-360X (Online)

PERAN BUDAYA *KALOSARA* DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN KONAWE

THE ROLE OF CALOSARA CULTURE IN REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING IN KONAWE DISTRICT

La Aso[1], Syahrun[2], Abdul Alim[3], Ansor Putra[4], La Diysi[5]

[1,4]Jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo,
Jl. H.E.A. Mokodompit, Kampus Hijau Bumi Tridharma Kendari, Indonesia
[2,3]Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo
[5]SMP Negeri 3 Kendari, Jl. Patimura No. 29, Puuwatu,
Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia
[1]Email Koresponden: la_aso@yahoo.co.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas peran budaya *kalosara* dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini dilakukan karena walaupun budaya *kalosara* masih dihormati, pemahaman tentang nilai dan praktiknya dalam kehidupan masyarakat masih sangat kurang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Penyediaan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan menggunakantiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Konawe sangat tepat untuk menerapkan pembangunan berbasis budaya *kalosara* karena budaya ini mengedepankan mekanisme musyawarah dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Selain itu, budaya *kalosara* memiliki banyak kearifan lokal yang sudah menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya masyarakat Konawe. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Kabupaten Konawedapat mengkaji berbagai aspek budaya *kalosara*, khususnya yang terkait dengan kepemimpinan, pembangunan daerah, dan hubungan masyarakat dan pemimpinnya. Hal ini sangat penting karena pembangunan akan tidak bernilai apabila pemerintah tidak mengenal masyarakat atau potensi yang tepat untuk pembangunan di daerah tersebut. Pembangunan daerah Kabupaten Konawe berbasis budaya *kalosara* tentunya memiliki banyak manfaat, diantaranya ciri kedaerahan akan bertahan dan berkembang, akan memperkuat kebijakan-kebijakan dari pemerintah, membangun dan menciptakan keselarasan hidup, dan sektor pendapatan daerah dan roda perekonomian akan berputar lancar dan baik.

Kata kunci: perencanaan, pembangunan daerah, budaya *kalosara*

ABSTRACT

This article discusses the role of kalosara tradition in planning and building of local government in Konawe Regency, Southeast Sulawesi. This study was conducted because the fact that although kalosara tradition is still respected, the understanding and implementation of values and meaning in kalosara tradition is decreasing. The data collection was done by observation, deep interview, and documentation. The data was analyzed by using descriptive qualitative method in three steps of analyzing; they are reduction, presentation, and drawing conclusion. The result shows that planning and building of local government based on ka-

losara tradition is very suitable because it emphasizes and gives priority to solidarity, unity, and discussion in every project and program of government. Besides, kalosara has much local wisdoms that have been known, mainly by customs figures in Konawe in terms of belief, norms, and cultures of Tolaki ethnic. So, planning and building of local government in Konawe Regencycan use and apply the values and meanings inkalosara tradition, mainly which is related to leadership, local government building, and relation between people and their leader. It is very useful and needed because the programs or projects of government are unvaluable if it does not recognize its people and potention and without participation of society, mainly custom figures. Further, planning and implementation of local government in Konawe Regency based on kalosara tradition has many advantages like the local characteristic can be maintained and improved, strengthen government wisdoms, create and build harmomny, and local income and economic system will increase and run well.

***Key words**: planning, local building, kalosara tradition, tolaki ethnic people.*

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah yang merupakan paradigma pembangunan masyarakat senantiasa menjadi wacana yang aktual untuk dibicarakan. Berbagai pihak memberikan masukan untuk pembangunan daerah, baik itu bersifat lokal maupun nasional. Hal ini tidak terlepas dari amanat GBHN, diantaranya mewujudkan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Salah satu bidang yang berperan dalam pembangunan daerah adalah sosial budaya. Walaupun demikian, aspek sosial budaya sangat jarang dikaitkan dengan pembangunan daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pengembangan daerah melalui aspek sosial budaya sangat penting karena daerah dan masyarakatnya tidak dapat dilepaskan dari aspek sosial budaya. Pengembangan aspek sosial budaya dalam pembangunan daerah mampu memberikan kontribusi yang cukup besar. Adekola & Egbo (2016) mengatakan bahwa tradisi diciptakan dengan tujuan-tujuan tertentu, baik terkait dengan politik maupun budaya itu sendiri. Beckstein (2017: 495) menyebutkan bahwa tradisi sering digunakan untuk menandai sebuah kepercayaan, kebiasaan, pengajaran, nilai, dan berbagai praktek kehidupan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Semangat berbudaya dan sosial politik yang mengedepankan mekanisme musyawarah dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik merupakan salah satu budaya masyarakat Indonesia yang menonjol. Mekanisme musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan adalah merupakan salah satu prosedur demokrasi yang substantif bagi pembangunan bangsa di daerah. Oleh karena itu, pemerintah sudah seharusnya memperhatikan aspek sosial budaya dalam membangun daerah-daerah. Setiap daerah memiliki adat dan kebudayaan masing-masing yang dipegang masyarakat setempat. Dan kehidupan mereka tidak bisa dipisahkan dari pembangunan nasional.

Salah satu suku terbesar di Sulawesi Tenggara adalah suku Tolaki. Suku Tolaki mendiami mayoritas daerah di Sulawesi Tenggara, termasuk di Kabupaten Konawe yang menjadi objek penelitian ini. Masyarakat Tolaki memiliki salah satu pegangan hidup, yang merupakan simbol peradaban yang mampu mempersatukan berbagai masalah atau persoalan yang mampu mengangkat martabat dan kehormatan mereka. Hal itu disebut dengan budaya *kalosara*. Budaya ini digunakan sebagai sumber nilai bagi seluruh masyarakat Tolaki, baik di perdesaan, maupun di perkotaan. Dari perspektif desentralisasi dan otonomi daerah, maka daerah dapat menggali dan mengembangkan budaya lokal sebaga

modal sosial dan budaya pembangunan masyarkat setempat (Thoyibi, 2004).

Berdasarkan gambaran singkat di atas, budaya *kalosara* memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Tolaki. Oleh karena itu, pemanfaatan budaya tersebut dalam pemerintahan sangat diperlukan untuk menciptakan suasana pemerintahan yang baik dan kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Bahkan, *kalosara* sebagai instrumen utama tata kehidupan masyarakat sampai di era sekarang ini masih eksis dipertahankan oleh segenap lapisan masyarakat, terutama dalam kehidupan sosial budaya. Dengan demikian, seiring dengan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan melahirkan berbagai permasalahan termasuk dalam tataran politik dan ekonomi, maka kehadiran *kalosara* sebagai instrumen solusi perlu dipertahankan dan dikembangkan.

Penelitian ini menggunakan konsep perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan berbasis budaya, dan teori semiotik. Pembangunan daerah berbasis budaya memiliki hubungan yang sangat erat dengan pembinaan masyarakat yang lebih maju dari masa-masa sebelumnya. Karena harapan pembangunan ini tidak sekedar di perkotaan, melainkan juga pedesaan sangat diimpikan masyarakat.

Dalam pembangunan daerah, penulis mengusung pendekatan budayakarena ada konsep yang sekarang berkembang yang disebut ekonomi berbasis etnik. Untuk membangkitkan pembangunan Kabupaten Konawe di masa datang, sudah saatnya mengembangkan pendekatan pembangunan daerah berbasis budaya dengan merevitalisasi dan merekonstruksi sistem nilai kebajikan, kearifan lokal dan budaya pemerintahan yang pernah hidup di masa silam dan adaptif di masa kini, dalam hal ini yaitu pengimplementasian budaya *kalosara*. Hal ini dapat disinergikan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menyandingkan ekologi dan tujuan pencapaian kemakmuran seluruh rakyat. Pendekatan ini menjadi teori pembangunan alternatif atau jalan ketiga sebagai pendekatan heterodoks yang belum menjadi sebuah teori besar. Tanpa manusia, budaya tidak ada, namun lebih penting dari itu, tanpa budaya, manusia tidak akan ada.

Terkait dengan teori semiotik, Barthes (1967) menyebutkan bahwa semiotik merupakan teori yang dapat menjelaskan produksi dan interprestasi makna. Prinsip dasarnya adalah bahwa makna dibuat oleh perkembangan tindakan dan objek yang berfungsi sebagai tanda dalam hubungannya dengan tanda lain. Masing-masing tanda dapat diinterprestasikan dalam tiga tahap, yakni pemfokusan pada realisasi gejala umum, pemfokusan pada objek/referen, dan pemfokusan pada interprestasi.

Dalam konteks semiotik, Geertz (1992: 76) menawarkan cara penafsiran kebudayaan dengan cara memaparkan konfigurasi atau sistem simbol-simbol makna secara mendalam dan menyeluruh. Hoed (2008: 5-6) menambahkan bahwa kajian tentang kebudayaan masa kini telah menjadi perhatian perkembangan teori semiotik, baik yang strukturalis maupun yang pragmatis. Semiotik strukturalis merujuk kepada teori tanda Saussure yang menyajikan konsep penanda dan petanda, sedangkan semiotik pragmatik merujuk kepada teori C.S. Pierce yang menyajikan trikotomi semiotika. Trikotomi yang disajikan Pierce adalah representament, obyek, dan interpretan. Semiotik melihat kebudayaan sebagai sistem tanda. Manusia sebagai anggota masyarakat yang berada di dalam lingkungan sosial budayanya, memberi

makna kepada tanda sesuai dengan konvensi yang berlaku.

Pada dasarnya, ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Tondrang (2000) meneliti peran budaya *kalosara* dalam membangun karakter masyarakat Tolaki. Tondrang juga mengkaji fungsi dan makna tradisi *kalosara* pada etnik Tolaki. Tarimana (1993) melakukan penelitian terkait dengan budaya Tolaki, termasuk budaya *kalosara*. Koodoh, dkk. (2011) mengkaji hukum adat orang Tolaki. Walaupun demikian, penelitian Koodoh, dkk. tidak menjelaskan secara mendetail mengenai budaya *kalosara*. Demikian pula, Tamburaka (2005) mengkaji peran *kalo* sebagai media komunikasi simbolik. Ramadan (2018) meneliti interpretasi *kalosara* dalam Rumah Adat Tolaki. Walaupun penelitian Ramadan terkait dengan teknik arsitektur, Ramadan memberi kontribusi penggunaan *kalosara* dalam penataan dan pembuatan desain model-model ruangan. Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, belum ditemukan satu penelitian pun yang membahas peran budaya *kalosara* dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Konawe. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji secara khusus mengenai peran budaya *kalosara* dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Konawe berdasarkan aspek sosial budaya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian strategi perencanaan pembangunan daerah berbasis *kalosara* (studi sosial kultural) di Kabupaten Konawe dalam upaya peningkatan ksejahateraan masyarakat menjadi sangat relevan dan penting untuk dilaksanakan. Hasil penelitian ini dapat membantu mengembangkan budaya *kalosara* sebagai salah satu dasar bagi strategi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Konawe.

METODE PENELITIAN

Kaitannya dengan pendekatan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif melalui metode wawancara yang disertai dengan pengamatan terhadap kehidupan masyarakat. Kirk dan Miller dalam Nasution (1988: 23) menyebutkan bahwa maksud metode kualitatif yaitu metode yang digunakan dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Lebih jauh, Bogdan dan Biklen (1992: 21-22) menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman (2009: 16-20) yang menyatakan bahwa kegiatan analisis data pada penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua adat Meluhu, Bapak Ajemain didapatkan bahwa konsep *kalosara* dalam kepemimpinan ada tiga. Pertama, *sara mondotambe* yang artinya menjemput. Kedua, *sara mempoteeni-ako* yang artinya pemberitahuan. Bentuk kedua ini selain digunakan untuk kepemimpinan juga dapat digunakan untuk pemberitahuan kematian. *Kalo* tersebut diikatkan dengan kain putih yang terdiri atas dua bentuk: apabila kain putih tersebut berbentuk orang-orangan, maka biasanya yang meninggal adalah keluarga, namun apabila kain putih tersebut hanya diikatkan/diletakkan dipinggirnya, makan hal itu untuk menunjukkan penguburan biasa. Ketiga, *sara mbongoe*, yang biasanya dibawa dengan menggunakan kain berwarna merah yang menunjukkan lagi ada bahaya dan pemimpin

saat itu harus melawan. Pada dasarnya, sejak zaman dahulu sudah ada struktur pemerintahan di Konawe, baik sebelum atau setelah datangnya Belanda, seperti *mokole*, *puutobu* (setingkat camat), dan *tono motuo* (setingkat lurah/kepala desa). Selain itu, ada juga yang bertugas sebagai hakim yang memutuskan perkara (*potuubu tara*) dan yang menyidangkan perkara (*wate'*).

Hal yang sangat penting dalam pembangunan adalah mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam setiap proyek pembangunan, khususnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Setiap daerah memiliki kekhasan tersendiri, sehingga unsur-unsur budaya yang dilibatkan dalam pembangunan boleh jadi berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, khususnya terkait dengan kearifan lokal, sebagai budaya lokal yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dan menjadi sebuah kebanggaan.

Masyarakat Konawe termasuk salah satu masyarakat di Sulawesi Tenggara yang sangat peduli dengan pemanfaatan kearifan lokal dalam pembangunan. Oleh karena itu, keberadaan *kalosara* yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Konawe merupakan sebuah modal besar untuk menjadikannya sebagai salah satu dasar dalam setiap perencanaan dan pembangunan daerah Konawe. Terlebih lagi, ada kerja sama yang baik antara tokoh adat dengan pemerintah Kabupaten Konawe dalam menyelesaikan isu-isu sosial yang merujuk pada masyarakat adat, yakni melaluimusyawarah untuk mencapai mufakat dalam menentukan keputusan.

Demikian pula, pemerintah seyog-yanya meminta saran dan masukan dari tokoh-tokoh adat setempat dalam setiap program kerja yang dapat dilakukan dengan menghadirkan *kalosara*. Bahkan, *kalosara* dapat digunakan dalam memusyawarakan pemilihan pemimpin karena budaya ini memiliki karismatik dan mendapatkan penghargaan dari kelompok masyarakat, sehingga kepemimpinan di Kabupaten Konawe berpedoman pada nilai-nilai yang sesuai dengan budaya *kalosara* yang lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi dan golongan. Oleh karena itu, cara pemerintahan seyogyanya memperhatikan nilai-nilai budaya *kalosara* untuk pembangunan karena pemerintah masa lalu menganggap budaya itu adalahsesuatu yang sakral yang dapat mempersatukanperbedaan yang terjadi darimasing-masingkelompok. *Kalosara* ini merupakan alat komunikasi yang efektif dan berfungsi sebagai hukum masyarakat adat. Sebagai alat penyaring agar masuknya budaya luar dapat terdeteksi, olehkarena itu perlu adanya pemajuan budaya lokal.

Pembangunan daerah Kabupaten Konawe yang menggunakan prinsip budaya *kalosara* sangat positif sekali, seperti nilai-nilai budaya yang diserap dalam bentuk aspirasi masyarakat melalui tokoh-tokoh tertentu. Hal ini menjadi salah satu cara untuk menampung kehendak atau kebutuhan masyarakat, dan itu sangat positif sekali dan sangat dianjurkan dalam undang-undang karena dalam pembangunan sangat diperlukan sebuah nilai-nilai budaya. Pemimpin yang menjunjung tinggi nilai-nilai *kalosara* diharap-kan mampu menjadi seorang pemimpin yang mengayomi masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan adat.Selain itu, pembangunan gedung dan perkantoran yang terdapat di wilayah pemerintahan Kabupaten Konawe juga dapat menggambarkan budaya *kalosara* agar lebih bermakna. Sehingga, bangunan atau gedung tersebut tidak hanya dipandang sebagai sebuah bangunan fisik tetapi memiliki makna yang mendalam, yang setidaknya bisa menyegarkan pemahaman masyarakat mengenai budaya *kalosara*. Pada dasarnya, *kalosara* adalah

lingkaran sebuah rotan dalam satu ikatan yang bermakna kebersamaandan wadahnya adalah kain putih yang bermakna kesucian.Sehingga, tidak diperkenankan adanya polarisasi pada ras, agama, atau etnis-etnis tertentu. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut perlu dikembangkan dan dapat diserap menjadi rujukan dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Kabupaten Konawe setuju jika pembangunan daerah berpedoman pada aspek nilai-nilai budaya *kalosara* karena dapat memperlancar pemerintahan/pembangunan dan tidak akan kacau. Penggunaan *kalosara* menuntut agar pemerintah senantiasa duduk bersama masyarakat, khususnya petua adat dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah. Bahkan, penggunaan *kalosara* ini dapat mendorong masyarakat untuk hidup berdampingan dengan etnis-etnis lain tanpa membeda-bedakan SARA. Bahkan, pada zaman pemberontakan, khususnya saat pemberontakan DI TII, masyarakat Konawe bersatu dengan membentuk PJK (Pasukan Jihat Konawe) untuk memberantas pemberontak. Semangat itu muncul karena kegiatan DI TII dianggap bertentangan dengan budaya *kalosara*. Terkait dengan rencana pembangunan daerah Kabupaten Konawe berbasis *kalosara*, masyarakat Konawe menyarankan perlunya dibuat Perda mengenai perkawinan berbasis budaya *kalosara*, tugu *kalosara*, undang-undang pranata adat, dan adanya penglibatan tokoh adat dalam berbagai proyek pembangunan. Selain itu, format atau aturan yang dibuat harus secara jelas menggambarkan adanya upaya pembangunan kebu-dayaan dan pembangunan daerah berbasis budaya *kalosara*. Pada dasarnya, pemerintah telah menaruh perhatian besar terhadap pelestarian *kalosara*.





Gambar 1 & 2. Model Tas *Kalo*

Gambar 1 dan 2 di atas merupakan tas untuk menyimpan *kalo* dengan dua model, yang merupakan salah satu program pemerintah untuk melestarikan *kalo*. *Kalo* tersebut disimpan di rumah adat *Konawe*, yang salah satunya terdapat di Keluruhan Meluhu, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe.

Demikian pula, penglibatan tokoh–tokoh adat dan masyarakat pada saat membuat kebijakan atau peraturan, khususnya yang langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakatsangat diperlukan, misalnya ketika akan membangun sebuah jalan, kira-kira bagaimana pandangan mereka, termasuk pembicaraan mengenai sumber daya manusia dan sumber daya alam. Pandangan mereka dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, sehingga diharapkan keputusan yang diambil pemerintah Kabupaten Konawe tidak mendapatkan tantangan atau keluhan dari masyarakat. Dengan kata lain, penglibatan tokoh adat

akan menghilangkan konflik di masyarakat karena tradisi masyarakat Konawe, yakni apabila segala sesuatu telah diputuskan di dewan adat, maka hal itu akan dipatuhi oleh semua masyarakat. Tokoh adat dalam memberikan pandangannya tentunya berdasarkan pengalaman selama hidup dan apa yang mereka ketahui tentang budaya, bukan karena kepentingan tertentu. Sehingga, pandangan mereka betul-betul berasal dari hati nurani untuk mengadakan perbaikan dan kemajuan daerah. Penglibatan mereka yang langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat dapat berupa pembangunan taman budaya, gedung, pemberian bantuan, pembuatan jalan desa, penyeleksian para pejabat–pejabat tertentu, kegiatan–kegiatan sosial yang sifatnya rutin, serta penentuan mata pelajaran muatan lokal di sekolah–sekolah. Dukungan dan pengenalan muatan lokal yang lebih menekankan pada budaya, etika, moral, cara membangun hubungan sosial antara anak dan orang tua, dan hal ini akan berdampak baik untuk pembangunan sumberdaya manusia yang berbasis kebudayaan lokal. Walaupun demikian, persoalan strategi pembangunan daerah, pemerintah tentunya lebih paham karena mereka pemangku kebijakan. Walaupun demikian, tokoh adat tentunya juga sangat paham sebab dan akibatnya mengenai konsep pembangunan. Sehingga, penglibatan tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat umum diharapkan akan sangat membantu kegiatan dan kelancaran pembangunan di Kabupaten Konawe.

Sebelum pemerintah menjadikan *kalosara* sebagai salah satu dasar pembangunan Kabupaten Konawe, maka perlu melakukan database dan identifikasi kekayaan budaya Konawe, sosialisasi tentang budaya *kalosara*, khusus-nya terkait dengan nilai-nilainya, baik ke instansi pemerintah maupun ke tokoh adat dan masyarakat luas. Hal ini perlu dilakukan agar semua pihak mengetahui bahawa *kalosara* telah digunakan sebagai salah satu dasar pemerintahan Kabupaten Konawe. Adanya upaya perlindungan, seperti dijadikannya *kalosara* sebagai warisan budaya tak benda melalui Perda yang diusulkan ke tingkat nasional. Selain itu, perlu adanya pelatihan atau penyuluhan juru-juru atau pelaku adat agar tetap pandai dan paham tentang budaya, khususnya *kalosara*. Program pengkaderan juga merupakan upaya yang sangat diperlukan karena masyarakat Konawe sekarang ini umumnya tidak mengetahui dan memahami lagi pelaksanaan budaya *kalosara*.

Berdasarkan penjelasan di atas diperlukan penggalian dan sosialisasi nilai-nilai budaya *kalosara* pada masyarakat umum, lembaga-lembaga atau organisasi tertentu yang bergerak dibidang pemajuan kebudayaan, sehingga nilai-nilai positif *kalosara* dapat diketahui dan diamalkan. Selain itu, juga perlu dilakukan melalui dilaksanakannya event-event daerah atau tradisi budaya; adanya kegiatan rutin dibidang kebudayaan agar dikenal oleh masyarakat luas; adanya regulasi dalam bentuk Perda Kabupaten Konawe tentang kewajiban untuk menerapkan nilai-nilai budaya pada pada semua tatanan masyarakat mulai dari RT,RW, Kelurahan, Kecamatan, bahkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada; adanya kurikulum di sekolah berbasis budaya lokal; adanya pameran kebudayaan dan seminar kebudayaan; pawai budaya yang diikuti oleh semua masyarakat; dan melibatkan pihak media sosial untuk membantu memperkenalkan dan mempromosikan budaya lokal yang ada.

Lebih jauh, pembangunan daerah berbasis *kalosara* di Kabupaten Konawe dapat menjaga agar tidak hilang nilai-nilai budaya tersebut,selain adanya upaya pewarisan kepada generasi Muda.

Pembangunan daerah berbasis budaya *kalosara* juga dapat berimplikasi pada keefektifan dalam melakukan pengambilan kebijakan. Proses kebijakan itu bisa lebih mudah karena memang nilainya itu bersumber dari nilai budaya itu sendiri, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan perencanaan akan tepat sasaran dan tepat manfaat.Berbeda jikalau nilai-nilai itu tidak diambil dari budaya setempat pasti ada restensi dan penolakan, tetapi karena memang dasarnya diambil dari nilai-nilai budaya, misalnya repsentasi dari anggota dewan, repsentasinya keterwakilan itu dari berbagai daerah, sehingga itu mempercepat suatu kebijakan itu bisa diterima. Pembangan Kabupaten Konawe berbasis budaya *kalo-sara* tentunya tidak terlepas dari begitu banyaknya dan tingginya nilai-nilai yang terdapat dalam budaya *kalosara* tersebut, termasuk mengandung nilai falsafah hidup yang sangat tinggi, seperti budaya patuh dan setia terhadap putusan lembaga adat; budaya tahu malu; dan budaya sopan santun dalam tata pergaulan, rasa berteman, rasa demokrasi, penuh tanggung jawab, rasa patuh, rasa saling membantu yang kesemuanya merupakan nilai-nilai yang sangat baik dan berguna dalam kehidupan masyarakat. Budaya *kalosara* yang begitu penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya tersebut menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Pembangunan daerah berbasis budaya *kalosara* merupakan salah satu model strategi pembangunan dalam konteks persaingan global. Keberhasilan dari pembangunan budaya di daerah terletak pada apakah proyek-proyek budaya dapat terhubung dengan perasaan memiliki (*sense of belonging*) dari masyarakat terhadap lokasi/peristiwa tertentu (Miles, 2005). Pemerintah Kabupaten Konawe harus menjadikan budaya *kalosara* sebagai elemen penting dalam mengerjakan berbagai proyek karena pendekatan ini mampu menghidupkan komunitas sekaligus menciptakan keunikan lokal. Kekhasan budaya *kalosara* yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Konawe menjadi hal yang sangat menarik untuk dikembangkan. Pembangunan daerah Kabupaten Konawe berbasis budaya *kalosara* juga sangat menekankan peran mobilisasi sehingga dapat menjangkau semua masyarakat. Pendekatan budaya *kalosara* berhubungan dengan penggunaan sumberdaya sarana budaya, seperti festival budaya yang telah ada sebagai katalis pemberdayaan dan harus dilakukan secara berkesinambungan dan mengikutsertakan komunitas lokal dalam proses pembuatan keputusan, termasuk mengintegrasikan festival budaya yang telah ada ke dalam setiap proyek pemberdayaan. Selain itu, rencana dan upaya tersebut harus dilakukan secara serius dan sistematis. Pandangan perencanaan pembangunan Kabupaten Konawe berbasis budayadapat bersumber pada suatu pemahaman terhadap sumber daya budaya *kalosara* sebagai salah satu elemen kunci dalam strategi pengambilan kebijakan atau keputusan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan peran komunitas lokal dan sumberdaya budaya, khususnya pada etnik Tolaki. Pemerintah Kabupaten Konawedapat mengenali potensi sosial dan budaya yang bisa memberi manfaat bagi seluruh elemen masyarakat.

Lebih jauh, pembangunan Kabupaten Konawe berbasis budaya *kalosara* tidak dapat direduksi sebagai proyek fisik tanpa melakukan revitalisasi makna budaya tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari berbagai kritik yang seringkali dilayangkan kepada proyek pembangunan, yang kritik tersebut biasanya muncul karena adanya proyek pembangunan yang menciptakan lingkaran setan dan pengabaian makna lokal dan nilai-nilai budaya lokal. Terlebih lagi, jika proyek pembangunan tersebut hanya menfokuskan pada pemberdayaan ekono-

mi dan mengabaikan sumberdaya budaya dari masyarakat.

Pada dasarnya, pembangunan daerah Kabupaten Konawe berdasarkan budaya *kalosara* dapat ditempuh melalui beberapa cara, diantaranya melibatkan masyarakat dan pemanfaatan kearifan lokal dalam budaya tersebut. Pembangunan di Kabupaten Konawe harus mampu menarik partisipasi masyarakat, khususnya sebagai kekuatan penekan dan pengimbang dalam proses penyusunan APBD. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Konawe harus dipandang sebagai media untuk membuka hati masyarakat untuk secara sadar dan tulus terlibat dalam proses pembangunan. Pembangunan daerah Kabupaten Konawe berbasis budaya *kalosara* dengan melibatkan masyarakat memiliki banyak keunggulan, diantaranyamemberi kesempatan yang nyata kepada mereka untuk mempengaruhi pembuatan keputusan dan mempersempit jurang pemisah antara pemerintah dan rakyat, serta menemukan kompromi di antara kepentingan-kepentingan yang berbeda. Salah satu partisipasi masyarakat yang dijelaskan dalam undang-undang adalah melalui Musrenbang sebagai mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah ke atas. Melalui Musrenbang diharapkan adanya keterlibatan masyarakat sejak awal sampai akhir dalam proses perencanaan pembangunan, yangdapat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kota/kabupaten.

Dengan adanya rencana pembangunan daerah Kabupaten Konawe, maka pembangunan di bidang budaya seyogyanya perlu dikembangkan sebagaimana bidang ekonomi, politik, dan bidang-bidang lainnya. Pembangunan di bidang budaya, sebagaimana pula bidang-bidang lainnya merupakan bagian integral dari keseluruhan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan tidak boleh mengabaikan aspek budaya karena aspek budaya inimengandung banyak kearifan lokal yang sarat makna. Adapun, pemberdayaan kearifan lokal dapat dilakukan melalui peningkatan nilai-nilai lokal, penguatan kelembagaan masyarakat adat, dan adanya regulasi khusus tentang penerapan nilai-nilai kearifan lokal. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Konawe berupaya untuk melakukan berbagai cara positif terkait dengan penggalian nilai-nilai kearifan lokal untuk diterapkan dalam berbagai proyek pembangunan.

Kearifan lokal yang terdapat dalam budaya *kalosara* mampu berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengontrol dan menghindarkan eksploitasi sumberdaya alam secara berlebih yang melampaui kemampuan daya dukungnya, sehingga hal ini dapat mendukung upaya pembangunan Kabupaten Konawe. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan, yakni menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara berkesinambungan, dan ditandai adanya pertumbuhan ekonomi yang positif. Pembangunan daerah akan berkelanjutan jika sumber-sumber pertumbuhan senantiasa terjaga dan lestari. Kearifan lokal yang terdapat dalambudaya *kalosara* juga dapat menciptakan harmonisasi antara alam dengan masyarakat karena nilai yang terkandung dalam budaya tersebut merupakan warisan secara turun temurun telah dijalani sebagai jalan hidup penyatuan kultur sosial dengan alam.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa kearifan lokal dalam budaya *kalosara* dapat digunakan untuk menjawab menjawab berbagai masalah masyarakat. Selain itu, budaya ini juga dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah karena mampu memperkuat hubungan sosial di antara warga masyarakat dan pemerintah. Kearifan budaya lokal dalam budaya *ka-*

losara dapat diimplementasikan dalam pembangunan, sehingga perencanaan pembangunan Kabupaten Konawe dapat mengkaji terlebih dahulu mengenai pola pikir dan apa saja yang ada pada daerah yang menjadi sasaran pembangunan tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Konawedapat mengkaji dan menelaah hal-hal atau aspek dari budaya *kalosara* yang memiliki kaitan dengan kepemimpinan, pembangunan daerah, dan hubungan masyarakat dan pemimpinnya karena perencaan tersebut akan menjadi kurang bernilai ketika pemerintah tidak mengenal masyarakat atau potensi yang tepat untuk pembangunan di daerah tersebut. Namun, penggalian potensi daerah yang hendak dibangun juga sangat penting agar pembangunan yang dilaksanakan tidak sia-sia dari segi material ataupun imaterial. Artinya, mengenal potensi daerah yang hendak dibangun sangat penting terlebih dengan pembangunan masyarakat, karena masyarakat setempatlah yang lebih memahami akan potensi daerahnya.

Pembangunan daerah Kabupaten Konawe berbasis budaya *kalosara* tentunya memiliki banyak manfaat, diantaranya ciri kedaerahan akan bertahan dan berkembang, akan memperkuat kebijakan-kebijakan dari pemerintah karenamemperhatikan dan mengakomodir harapan masyarakat. Selain itu, penggunaan budaya *kalosara* dalam pembangunan akan membangun dan menciptakan keselarasan hidup, pengembangan bisnis pariwisata (ekonomi kreaktif), terbangunnya jati diri masyarakat, laju pembangunan cepat karena tidak ada tantangan, khususnya dari tokoh adat, serta sektor pendapatan daerah dan roda perekonomian akan berputar lancar dan baik. Hal ini berbeda, ketika media musyawarah bersama masyarakat ditiadakan maka akan menimbulkan pertanyaan besar dan tantangan dari masyarakat. Budaya *kalosara* dapat dilakukan melalui metode par tisipatif, pembangunaan dan penataan infrastruktur, dan pembangunan gedung perkantoran yang memiliki ciri khas budaya *kalosara*. Pembangunan karakter, moral, dan etika dapat terwujud melalui penerapan budaya *kalosara*. Dalam budaya *kalosara* juga memperhatikan pandangan–pandangan dari tokoh adat, sehingga diharapkan pekerjaan yang direncanakan menjadi lancar, ketika menghadapi sebuah masalah yang berkaitan adat istiadat dan agama dapat diminimalisir secepat mungkin. Hal ini juga dapat meningkatkan rasa solidaritas. Hal ini berbeda ketika aspek budaya kurang dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah, maka budaya-budaya barat negatif akan mudah masuk dan mempengaruhi masyarakat, adanya kemungkinan penolakan terhadap kebijakan yang diberlakukan karena tidak mendapat dukungan dari semua lapisan kalangan masyarakat. Selain itu, pengabaian aspek budaya dalam pembangunan akan berdampak sosial, yakni tidak ada penghargaan dari masyarakat pada kegiatan pembangunan sehingga pembangunan akan terhambat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, peran tradisi *kalosara* dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Konawe maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Sebelum pemerintah menjadikan tradisi *kalosara* sebagai salah satu dasar pembangunan di Kabupaten Konawe, maka perlu melakukan database dan identifikasi kekayaan budaya Konawe, sosialisasi tentang budaya *kalosara*, khususnya terkait dengan nilai-nilainya, baik ke instansi pemerintah maupun ke tokoh adat dan masyarakat luas. Hal ini perlu dilakukan agar semua pihak mengetahui bahawa *kalosara* telah digunakan sebagai salah satu dasar pemerintahan Kabupaten Konawe. Adanya upaya perlindungan,

seperti dijadikannya tradisi *kalosara* sebagai warisan budaya tak benda melalui Perda yang diusulkan ke tingkat nasional. Selain itu, perlu adanya pelatihan atau penyuluhan juru-juru atau pelaku adat agar tetap pandai dan paham tentang budaya, khususnya *kalosara*. Program peng-kaderan juga merupakan upaya yang sangat diperlukan karena masyarakat Konawe sekarang ini umumnya tidak mengetahui dan memahami lagi pelaksanaan budaya *kalosara*. Demikian pula, penglibatan tokoh–tokoh adat dan masyarakat pada saat membuat kebijakan atau peraturan, khususnya yang langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat sangat diperlukan.

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Konawe sangat tepat untuk menerapkan pembangunan berbasis budaya *kalosara* karena budaya ini mengedepankan mekanisme musyawarah dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Selain itu, budaya *kalosara* memiliki banyak kearifan lokal yang sudah menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya masyarakat Konawe. Kearifan lokal dapat diekspresikan dalam tradisi yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Kabupaten Konawedapat mengkaji berbagai aspek budaya *kalosara*, khususnya yang terkait dengan kepemimpinan, pembangunan daerah, dan hubungan masyarakat dan pemimpinnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adekola & Egbo, M.C. (2016). *Traditions and Customs in Community Development: The Case of Nkanu West and Nkanu East Local Government Areas of Enugu State, Nigeria* dalam Journal of Education and Practice, Vol. 7, No. 18.

Barthes, R. (1967). *Elements of Semiology* (trans. Annette Lavers & Colin Smith). London: Jonathan Cape.

Beckstein, M. (2017). *The Concept of a Living Tradition*, dalam European Journal of Social Theory, Vol. 20 (4), page: 491-510.

Bogdan, R. & Biklen, S. (1992). *Qualitative Research for Education*. Boston, MA: Allyn and Bacon.

Geertz, C. (1992). *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.

Hoed, B.H. (2008). *Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya.* Depok Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) UI.

Koodoh, E.E., Alim, A. &Bachruddin. (2011). *Hukum Adat Orang Tolaki*. Yogyakarta: Teras.

Miles, Mattew, B. & Huberman, A.M. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.

Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Ramadan, S. (2018). *Interpretasi Kalosara dalam Rumah Adat Tolaki* dalam Nalars Jurnal Arsitektur Vol. 17 No. 2 Juli 2018.

Tamburaka, B. (2012). *Peran Kalo sebagai Media Komunikasi Simbolik*. Kendari: Writing Collections.

Tarimana, A. (1993). *Kebudayaan Tolaki.* Jakarta: Balai Pustaka.

Thoyibi, M. (2004). *Sinergi Agama dan Budaya Lokal*. Surakarta: MUP-UMS.

Tondrang, A. (2000). *Peranan Kalosara dalam Pembentukan Karakter Masyarakat Tolaki.* Unaaha: Makalah dalam Rangka Musyawarah Adat I Suku Bangsa Tolaki.